

DIVERSIFIKASI PANGAN LOKAL DALAM MENGANTISIPASI KRISIS PANGAN GLOBAL

19

Edmira Rivani

Abstrak

Sejak awal 2022, ekonomi pangan global menghadapi fenomena kenaikan harga pangan. Tulisan ini akan mengkaji bagaimana memperkuat diversifikasi pangan lokal guna mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan dari luar negeri. Sayangnya, ketahanan pangan di Indonesia tak kunjung terwujud. Skor indeks ketahanan pangan global Indonesia pada 2021 berada di skor 59,2 dengan kategori moderat. Sementara, skor Indeks Kelaparan Global menempati urutan ke-73 dari 116 negara dengan skor 18.0 yang memiliki tingkat kelaparan sedang. Indonesia dikaruniai tanah subur dan kekayaan alam melimpah. Namun, kerawanan pangan masih menjadi tantangan tersendiri. Diversifikasi pangan lokal yang diharapkan menjadi solusi, dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas produksi pangan lokal dalam negeri, pangan fungsional berbasis kearifan lokal, serta pemberian fasilitas akses teknologi untuk mendukung diversifikasi pangan lokal. Dukungan dan pengawasan DPR RI khususnya komisi IV diperlukan dalam pencapaian ketahanan pangan. Tentunya, dengan tetap memperhatikan aspek pasokan, ketersediaan, akses, dan kualitas pangan.

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, perang Rusia-Ukraina di Eropa Timur, serta iklim yang kurang kondusif sangat mempengaruhi rantai pasokan makanan secara global. Dua tahun dihantam covid-19, sistem pangan global masih cukup resiliensi walaupun sistem logistik global terganggu. Kenaikan harga pangan global masih dapat diredam karena kinerja produksi di beberapa negara

tidak terlalu buruk. Harga rata-rata beras di Indonesia masih cukup stabil, yakni Rp11.800/kg selama dua tahun (Media Indonesia, 14 Juni 2022). Namun, disrupsi dan hantaman terhadap sistem pangan global demikian dahsyat. Banyak produsen pangan dilanda kekeringan sehingga harga jagung dan kedelai mulai beranjak naik. Terlebih lagi setelah invasi Rusia ke Ukraina, kenaikan harga pangan tidak dapat dihindari. Sebagai produsen energi yang besar,



konflik Rusia-Ukraina melonjakkan harga energi, khususnya minyak bumi dan gas. Minyak bumi menjadi penopang utama sistem logistik dan perdagangan global. Gas menjadi bahan baku produksi pupuk urea atau salah satu input penting bagi sistem produksi pangan.

Sejak awal 2022, ekonomi pangan global menghadapi fenomena yang cukup dahsyat karena kenaikan harga pangan. Harga gandum naik lebih dari dua kali lipat dari rata-rata USD280/ton pada 2021 menjadi USD650/ton pada Mei 2022. Harga minyak nabati global naik, bahkan sejak pandemi covid-19 pada awal 2020 yang hampir setara dengan kondisi ketika krisis pangan global pada 2008. Harga minyak sawit mentah (CPO) melonjak dari rata-rata US\$1.131/ton menjadi US\$1.717/ton pada Mei 2022. Harga minyak rapa (*rapeseed oil*) yang banyak diproduksi di Eropa telah mendekati US\$1,900 per ton, suatu rekor kenaikan harga amat tinggi. Indonesia sebagai produsen CPO terbesar bahkan mengalami lonjakan harga minyak goreng sampai di atas Rp20.000/liter yang sempat menimbulkan persoalan sosial-ekonomi politik (Media Indonesia, 14 Juni 2022).

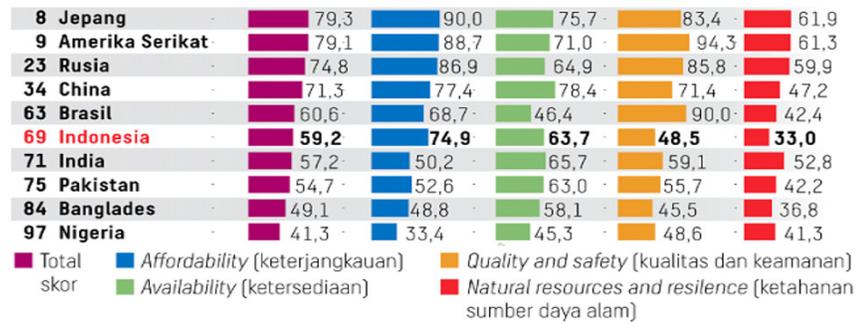
Tulisan ini akan mengkaji bagaimana memperkuat diversifikasi pangan lokal guna mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan dari luar negeri, sehingga tidak banyak bergantung pada pasokan pangan global yang begitu rentan akibat konflik bersenjata maupun krisis kesehatan. Tentunya, dengan tetap memperhatikan aspek pasokan, ketersediaan, akses, dan kualitas pangan.

Indonesia Rentan Ketahanan Pangan

Dalam kontestasi geopolitik pangan, wilayah Indonesia memiliki area geografis, demografis, dan sumber daya alam yang melimpah dan strategis. Namun, Indonesia masih berhadapan dengan permasalahan ketahanan pangan dan impor pangan dalam skala besar. Bukan kali ini saja Indonesia mengalami persoalan kelangkaan bahan pangan. Tahun 2008, misalnya, kelangkaan minyak goreng serta tahu dan tempe pernah terjadi. Harga minyak goreng melejit karena tingginya harga minyak sawit mentah (CPO) dunia. Situasi yang sama berulang di tahun 2011 (Kompas.id, 22 Maret 2022). Kelangkaan bahan pokok juga terjadi pada komoditas tahu dan tempe. Dua produk pangan harian masyarakat itu pernah absen hadir di sejumlah warung angkringan dan pasar tradisional pada tahun 2008, lantaran harga kedelai yang menjadi bahan bakunya melambung tinggi. Komoditas lainnya, yaitu gandum, harganya pun naik tak terbendung. Dengan pengalaman tersebut, Indonesia semestinya mempunyai cukup cara untuk mengatasi problem kelangkaan bahan pokok.

Sayangnya, hal serupa masih terus menjadi kendala dari tahun ke tahun. Ketahanan pangan tak kunjung terwujud. Berdasarkan laporan *Economist Impact*, skor indeks ketahanan pangan global (GFSI) di Indonesia pada 2021 berada di skor 59,2 dengan kategori moderat (Gambar 1.). Skor indeks tersebut turun 2,2 poin dari tahun sebelumnya yang mencapai kategori baik dengan skor 61,4.

Peringkatnya pun merosot dari peringkat ke-63 menjadi 69



Gambar 1. Skor Indeks Ketahanan Pangan Pada 10 Negara dengan Jumlah Penduduk Terbanyak Tahun 2021

Sumber: *Economist Impact dan Kompas, 2022*

seiring dengan skor yang menurun. Bahkan, jika dibandingkan dengan beberapa negara yang memiliki karakteristik yang serupa, seperti banyaknya jumlah penduduk, posisi Indonesia masih relatif tertinggal. Brasil, misalnya, negara dengan penduduk sebanyak 209 juta jiwa, menduduki peringkat ke-63 dengan skor 60,0 di tahun 2021 (Gambar 1.). Begitu halnya dengan China, negara berpenduduk 1,4 miliar jiwa dan menjadi yang tertinggi di dunia itu juga dilimpahi daratan terluas. Dari 9,4 juta km persegi, lebih dari separuhnya digunakan untuk pertanian. Sehingga, luas lahan pertanian menjadi 0,0048 km persegi per orang. China mendapatkan peringkat ke-34 (Gambar 1.), sangat jauh dari Indonesia.

Selain itu, skor Indeks Kelaparan Global (*Global Hunger Index*) tahun 2021, Indonesia menempati urutan ke-73 dari 116 negara dengan skor 18,0 yang memiliki tingkat kelaparan sedang. Indonesia dikaruniai tanah subur dan kekayaan alam melimpah. Namun, kerawanan pangan dan ketahanan sumber daya alam masih menjadi tantangan Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan warganya. Kondisi ini menuntut peran dan komitmen

para pemangku kebijakan dalam mengambil setiap langkah dan keputusan.

Memperkuat Diversifikasi Pangan Lokal

Risiko kenaikan harga-harga pangan merupakan salah satu hal yang perlu diwaspadai. Pemerintah serta pemerintah daerah perlu memprioritaskan peningkatan produksi pangan. Tidak hanya beras, tapi juga pangan lainnya seperti jagung, ubi kayu, ubi rambat, dan porang. Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga perlu mendorong peningkatan stok pangan diiringi dengan optimasi logistik atau pengelolaan stok pangan tersebut. Kementerian terkait dan Bapanas harus memiliki serangkaian skenario kondisi dari yang agak buruk hingga yang sangat buruk, disertai berbagai alternatif solusi untuk mengatasi setiap kondisi tersebut.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susi Wijono Moegiarso, mengatakan pemerintah senantiasa mendorong pengembangan produk komoditas pertanian lokal yang mempunyai potensi ekonomi tinggi. Selain untuk menggerakkan perekonomian rakyat, upaya tersebut juga dapat

menjadi solusi krisis pangan global (Media Indonesia, 13 Juni 2022). Selain itu, Kementerian Pertanian dapat memperkuat program agar diversifikasi pangan lokal dengan tujuan menekan impor melalui optimalisasi pangan lokal segera terwujud.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjelaskan bahwa, “Penganekaragaman pangan merupakan upaya meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dan yang berbasis potensi sumber daya lokal.” Dalam mengantisipasi krisis pangan pasca pandemi serta efek domino dari konflik di Eropa Timur yang menyebabkan kenaikan harga bahan pangan, diversifikasi pangan dapat dilakukan dengan beberapa cara.

Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas produksi pangan lokal dalam negeri melalui lumbung pangan (*food estate*) dan poros maritim dunia (*world maritime axis*). Sejumlah program strategis nasional telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, di antaranya peningkatan produksi pangan melalui pengembangan *food estate*. Selain itu, dalam upaya mempertegas jati diri Indonesia sebagai negara Poros Maritim Dunia, pembangunan mulai dari aspek infrastruktur, politik, sosial-budaya, hukum, keamanan, hingga ekonomi pun dicanangkan dalam melindungi sumber daya kelautan dan perikanan. Meski program kedua sektor tersebut telah dieksekusi secara nasional, namun masih perlu adanya penguatan dalam pemanfaatan teknologi dalam proses hulu-hilir komoditas pertanian dan perikanan (theconversation.com, 14 Juni 2022).

Selanjutnya, pangan fungsional berbasis kearifan lokal yang menitikberatkan pada komoditas unggulan di suatu daerah. Pangan fungsional menurut Badan Pengawas

Obat dan Makanan (BPOM) adalah pangan olahan yang mengandung satu atau lebih komponen fungsional yang mempunyai fungsi fisiologis tertentu, serta terbukti tidak membahayakan dan bermanfaat bagi kesehatan. Pangan fungsional sudah berkembang dengan pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Konsumen memilih makanan tidak lagi sebagai pengenyang perut belaka, tapi harus mengandung komposisi gizi yang baik, penampakan, cita rasa yang menarik, dan tentu saja harus memiliki manfaat bagi kesehatan.

Di Indonesia kita mengenal jajanan tradisional berbahan umbi-umbian seperti klepon goreng ubi ungu, bika ambon ubi, kue lumpur ubi, kolak singkong, dan getuk ubi ungu. Umbi-umbian seperti ubi jalar, gembili, ganyong, dan lain sebagainya berperan sebagai pangan fungsional yang mengandung serat yang tinggi, oligosakarida yang bersifat mengenyangkan, serta bebas dari gluten. Dengan ketiadaan gluten tersebut, produk olahan tersebut dapat dikonsumsi oleh konsumen yang alergi dan tidak diperbolehkan mengonsumsi gluten, seperti penderita resisten gluten (suara.com, 14 Juni 2022).

Hal lainnya yang tidak kalah penting adalah pemberian fasilitas akses teknologi untuk mendukung diversifikasi pangan lokal. Akses hasil inovasi baik oleh pemerintah, perguruan tinggi, maupun swasta perlu diperluas secara sporadis kepada petani, nelayan, dan *stakeholder* untuk mendorong transformasi pertanian dan perikanan dari pola tradisional menjadi lebih modern guna mendongkrak produktivitas dan menghadapi perubahan iklim. Misalnya, *Smart*

Greenhouse, merupakan hasil inovasi terbaru pemerintah yang mampu mengendalikan suhu *microclimate* pada sebuah lahan pertanian modern untuk menghasilkan produksi pangan berkualitas yang berbasis pada konsumsi dalam negeri serta peningkatan ekspor. Selain itu, pada sektor perikanan budidaya, pemanfaatan kecerdasan buatan diaplikasikan untuk menganalisis kualitas air, perubahan lingkungan, hingga mengetahui kondisi ikan. Integrasi sistem kecerdasan buatan dengan kamera bawah air dapat mengetahui pemberian pakan secara presisi sesuai dengan bobot ikan tersebut. Keberhasilan diversifikasi tidak saja akan memperkuat ketahanan pangan, tapi juga akan bermanfaat bagi penghematan devisa negara jutaan dolar per tahunnya yang berarti juga meringankan beban keuangan negara (theconversation.com, 14 Juni 2022).

Berbagai program terkait diversifikasi pangan yang sudah dilaksanakan sejak lama oleh pemerintah seharusnya dapat dilaksanakan secara konsisten dan diperbesar sasaran dan volume kegiatannya. Dalam hal ini, Komisi IV DPR RI diharapkan dapat meningkatkan pengawasan, khususnya dalam peningkatan produksi, nilai tambah, dan daya saing produk pertanian sehingga ketersediaan pangan di Indonesia tetap aman. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan komoditas andalan, karakteristik, dan kebutuhan daerah masing-masing.

Penutup

Ancaman krisis pangan yang membayangi dunia harus diantisipasi oleh pemerintah. Langkah-langkah yang komprehensif dibutuhkan

agar Indonesia tidak terkena dampak besar dari permasalahan rantai pasok global. Namun, hal tersebut menghadapi tantangan dimana skor indeks ketahanan pangan global Indonesia pada tahun 2021 berada di skor 59,2 dengan kategori moderat. Sementara, skor Indeks Kelaparan Global menempati urutan ke-73 dari 116 negara dengan skor 18.0 yang memiliki tingkat kelaparan sedang. Padahal Indonesia dikaruniai tanah subur dan kekayaan alam melimpah.

Pemerintah perlu mendorong pengembangan produk komoditas pertanian lokal yang mempunyai potensi ekonomi tinggi. Selain untuk menggerakkan perekonomian rakyat, upaya tersebut juga dapat menjadi solusi krisis pangan global. Dukungan dan pengawasan DPR RI, khususnya Komisi IV dalam hal peningkatan produksi, nilai tambah, dan daya saing produk pertanian sangat diperlukan. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan komoditas andalan, karakteristik, dan kebutuhan daerah masing-masing. Sehingga Indonesia tidak banyak bergantung pada pasokan pangan global.

Referensi

- “Antisipasi Ancaman Krisis Pangan Global”, *Republika*, 13 Juni 2022, hal.10.
- “Indonesia Harus Perkuat Diversifikasi Pangan Lokal, Belajar dari Krisis Pangan Global Saat Ini”, 14 Juni 2022, <https://www.suara.com/tekno/2022/06/14/141640/indonesia-harus-perkuat-diversifikasi-pangan-lokal-belajar-dari-krisis-pangan-global-saat-ini>, diakses 14 Juni 2022.

“Indonesia Perlu Perkuat Diversifikasi Pangan Lokal Untuk Hadapi Krisis Pangan Global”, 14 Juni 2022, <https://theconversation.com/indonesia-perlu-perkuat-diversifikasi-pangan-lokal-untuk-hadapi-krisis-pangan-global-181760>, diakses 14 Juni 2022.

“Krisis Pangan Global Peluang Bagi Indonesia”, *Media Indonesia*, 13 Juni 2022, hal.10.

“Transformasi Sistem Pangan”, *Media Indonesia*, 14 Juni 2022, hal.6.

“Urgensi Menjawab Krisis Pangan Nasional”, 22 Maret 2022, <https://www.kompas.id/baca/telaah/2022/03/21/urgensi-menjawab-krisis-pangan-nasional>, diakses 14 Juni 2022.



Edmira Rivani
edmira.rivani@dpr.go.id

Edmira Rivani, S.Si, M.Stat. menyelesaikan studi S1 pada jurusan Statistika – Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran pada tahun 2008, dan melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana pada Jurusan Statistika Terapan – Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran tahun 2009. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI mulai tahun 2009 sebagai Peneliti Ekonomi dan Kebijakan Publik dengan kepakaran kebijakan ekonomi. Beberapa karya tulis ilmiah tentang ekonomi dan kebijakan publik telah dihasilkan seperti: Perubahan Struktur Ekonomi Tenaga Kerja dan Analisis Multidimensional Scaling (MDS) dalam Mengelompokkan Penyerapan Tenaga Kerja di Berbagai Provinsi (2014), Peningkatan Daya Saing Industri Indonesia dalam Menghadapi ASEAN China Free Trade Area (2015), Peran Sektor Pertanian dalam Pembangunan Berkelanjutan (2015).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.